

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Maksud Dan Tujuan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan OPD Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dasar Hukum

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2022
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

*Organisasi
Perangkat Daerah
Provinsi Banten*

1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

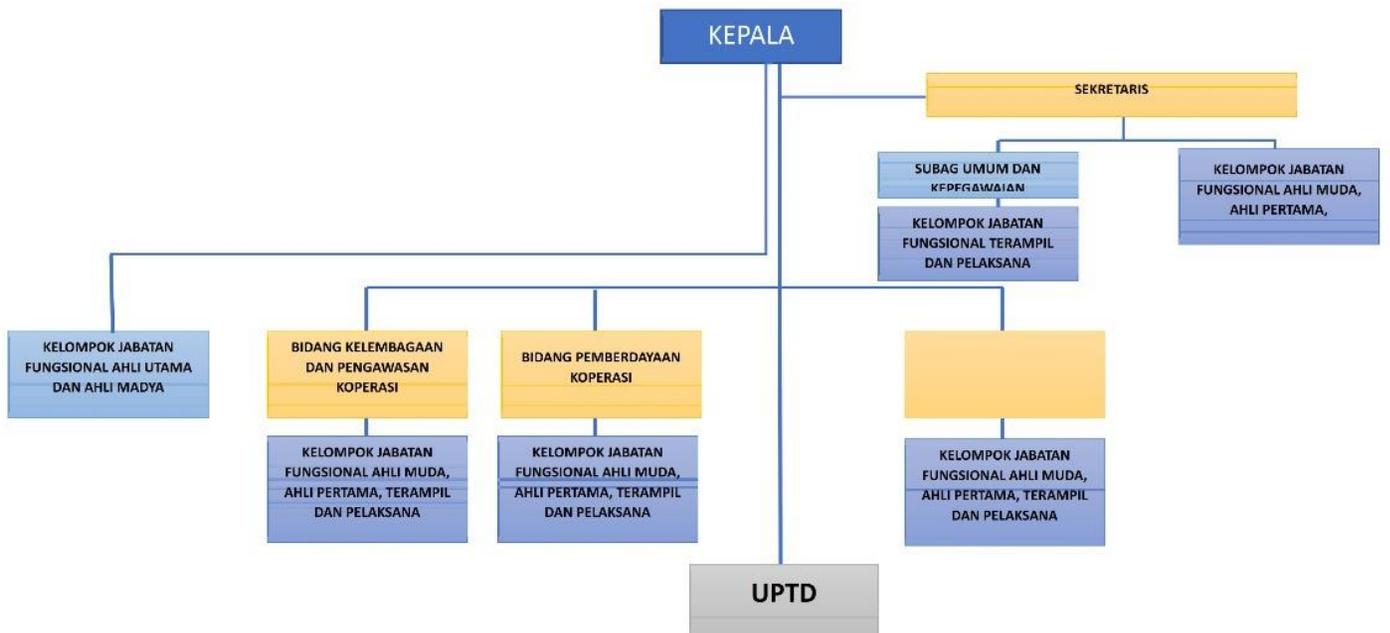
Pada tahun 2023, OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dipimpin oleh Agus Mintono, SH.M.Si selaku Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, adapun struktur Organisasi OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut : (Struktur Organisasi OPD)

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 83 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi dan kewenangan :

1. Penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
2. Penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
3. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
4. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
5. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
6. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten



1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar Realisasi
Pencapaian Target
Kinerja Keuangan*

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah sebesar *Rp. 0,00* hal ini disebabkan oleh OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah tidak termasuk sebagai OPD yang memiliki fungsi penerimaan.

Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar *Rp. 26.432.083.200,00* untuk membiayai Belanja Operasi, realisasi sebesar *Rp. 24.622.323.873,00* atau sebesar 93,15 % Sedangkan alokasi Belanja Modal setelah perubahan sebesar *Rp. 451.911.200,00* Realisasinya sebesar *Rp. 413.330.600,00* atau 91,46 % dari anggaran.

Realisasi Belanja OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebesar *Rp. 25.035.654.473,00* atau 93,12 %. dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar *Rp. 26.883.994.400,00*.

Adapun Rincian Realisasi Belanja APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten TA. 2023 terdiri dari Belanja Operasi sebesar *Rp. 24.622.323.873,00* dan Belanja Modal sebesar *Rp. 413.330.600,00*

*Hambatan dan
Kendala*

2.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan disebabkan kurang cermat dalam mempersiapkan kegiatan. Adapun untuk kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 90% ada Empat kegiatan yaitu pertama Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang capaian Realisasi keuangannya hanya mencapai 74,77% atau *Rp. 745.861.470,00* dari pagu Anggaran *Rp.997.525.500,00*. hal ini disebabkan Karena Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan 100 % untuk Realisasi Fisiknya , namun pada penyerapan Anggaran Keuangan terjadi efisiensi mengingat ada ketentuan-ketentuan pada kegiatan tertentu. Untuk Narasumber dan atau Moderator dari OPD nya tidak diperbolehkan diberikan Belanja Narasumber dan atau Moderator

Berikutnya yang kedua adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang capaian Realisasi keuangannya hanya mencapai 70,97%. atau Rp. 37.625.532,00 dari pagu Anggaran Rp. 53.014.000,00 Hal ini disebabkan Karena Pada Kode Rekening Belanja Kursus singkat/Pelatihan tidak ada Pegawai yang mengikuti Kursus atau Pelatihan yang biayanyadi bebankan pada Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

Berikutnya yang ketiga adalah Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan yang capaian Realisasi keuangannya hanya mencapai 89,43%. atau Rp. 2.251.994.895,00 dari pagu Anggaran Rp. 2.518.036.000,00 Hal ini disebabkan Kegiatan telah dilasanakan secara Fisik 100 % Realisasi Anggaran tidak sama dengan Pagu Anggaran dikarenakan terdapat efisiensi Anggaran

Berikutnya yang keempat adalah Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah yang capaian Realisasi keuangannya hanya mencapai 84,19% atau Rp. 517.646.252,00 dari pagu Anggaran Rp.614.845.400,00. hal ini disebabkan Karena Terdapat Kegiatan Konsultasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK (APBD) dan Mediasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK (APBD) tidak terserap dikarenakan Pelaku Usaha tidak ada yang mengusulkan untuk bantuan Hukum tersebut sehingga Anggaran tidak terserap. Terdapat Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada yang mengusulkan dari Pelaku Usaha mengenai Konsultasi dan Mediasi Hukum.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah*

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan Keuangan Pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan Perundangan mewajibkan disajikannya laporan Keuangan dengan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi dilingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan OPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman a. Hewan b. Tanaman	Tidak ada batas Kapitalisasi Tidak ada batas Kapitalisasi
3.2	Aset Tetap Renovasi	Mengikuti kebijakan Akuntansi Batas Kapitalisasi atas Objek yang melekat

*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai / gordena / vertical atau horizontal blind / karpet / wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstrakomtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (OPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

- 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (OPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset

Non lancar) telah diterima.

- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

*Kebijakan
Akuntansi
Beban*

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

*Kebijakan
Akuntansi Aset*

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

(06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

(07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

(22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

(23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

1) Alat-alat berat dan alat-alat besar

2) Alat-alat angkutan

3) Alat-alat bengkel dan alat ukur

4) Alat-alat pertanian/peternakan

5) Alat-alat kantor dan rumah tangga

6) Alat studio dan alat komunikasi

7) Alat-alat kedokteran

8) Alat-alat laboratorium

9) Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

1) Bangunan gedung

2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Jalan dan jembatan
- 2) Bangunan air/irigasi
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Buku dan perpustakaan
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
- 4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa OPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh OPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

1	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

(37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

(39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

*Kebijakan
Akuntansi
Kewajiban*

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

Pendapatan
Rp 0

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0 % hal ini disebabkan oleh OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tidak memiliki fungsi pendapatan.

Belanja
Rp.25.035.654.473,00

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 25.035.654.473,00 atau 93,12% dari Anggaran belanja sebesar Rp. 26.883.994.400,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 01
Realisasi Belanja OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023

Uraian Rekening Jenis Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	26,432,083,200.00	24,622,323,873.00	93.15
Belanja Pegawai	12,206,026,500.00	11,419,766,050.00	93.56
Belanja Barang dan Jasa	14,226,056,700.00	13,202,557,823.00	92.81
BELANJA MODAL	451,911,200.00	413,330,600.00	91.46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270,948,200.00	253,330,600.00	93.50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80,965,000.00	80,000,000.00	98.81
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100,000,000.00	80,000,000.00	80.00
JUMLAH BELANJA	26,883,994,400.00	25,035,654,473.00	93.12

Belanja Operasi
Rp.24.622.323.873,00

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 24.622.323.873,00 atau 93,615 dari Anggaran sebesar Rp. 26.432.083.200,00 target Realisasi Keuangan sudah diatas 90 %.

Belanja Pegawai
Rp.11.419.766.050,00

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.419.766.050,00 atau 93,56% dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.206.026.500,00. Target Realisasi Keuangan sudah diatas 90 %.

*Belanja Barang dan
Jasa*
Rp.13.202.557.823,00

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi Belanja Barang dan Jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 13.202.557.823,00 atau 92,81% dari Anggaran sebesar Rp. 14.226.056.700,00. Hal ini disebabkan adanya Peningkatan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 Target Realisasi Keuangan sudah diatas 90 %

Belanja Modal
Rp.413.330.600,00

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran Anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Realisasi Belanja Modal OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 413.330,600,00 atau 91,46% dari Anggaran sebesar Rp. 451.911,200,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sudah di atas 90 %

Belanja Tanah
Rp. 0,00

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp.0,00 Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tidak mengalokasikan Anggaran Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin*
Rp.253.330.600,00

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2023 adalah sebesar Rp.253.330.600,00 atau 93,50 % dari Anggaran sebesar Rp 270.946.200,00. Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sudah di atas 90 %

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp. 80.000.000,00*

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.80.000.000,00 atau 98,81% dari Anggaran Rp. 80.965.000,00 dialokasikan untuk Bangunan Gedung Kantor Penataan Lobby dan Mushola . Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sudah di atas 90 %

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp.0,00*

4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp.0,00. Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tidak mengalokasikan Anggaran untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

*Belanja Aset Tetap
Lainnya
Rp.80.000.000,00*

4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

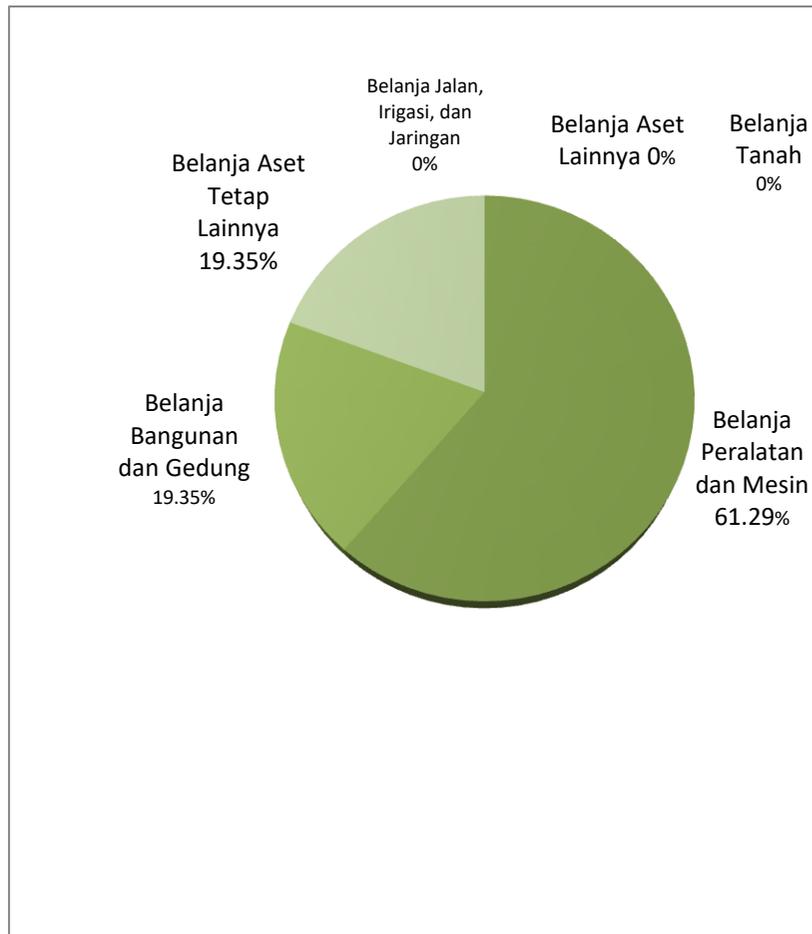
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp.80.000.000,00. Atau 80,00% dari Anggaran Rp. 100.000.000,00 berupa Belanja Modal Software Aplikasi Pelaporan Pengelolaan Akuntansi Bagi UMKM

*Belanja Aset
Lainnya
Rp.0,00*

4.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah Rp.0,00. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal aset lainnya.

Grafik dan Tabel 02
Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023



No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	
		Rp.	%
1	2	3	4
1	Belanja Tanah	-	0.00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	253,330,600.00	61.29
3	Belanja Gedung dan Bangunan	80,000,000.00	19.35
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	0.00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	80,000,000.00	19.35
6	Belanja Aset Lainnya	-	0.00
	Jumlah	413,330,600.00	100.00

Surplus/(Defisit)
(Rp.25.035.654.473.00)

4.1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten mengalami Realisasi (Defisit) sebesar Rp. (25.035.654.473,00), hal ini terjadi karena OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tidak memiliki fungsi Pendapatan.

Laporan Operasional
Rp. 0,00

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO
Rp.0,00

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp.0, Hal ini disebabkan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tidak memiliki fungsi Pendapatan.

Beban LO
Rp.26.921.746.582.50

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp.26.921.746.582,50 sedangkan Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp.26.714.308.457,56 Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

	26,921,746,582.50	26,714,308,457.56	99.23	207,438,124.94
BEBAN				
Beban Pegawai	11,419,766,050.00	11,963,823,196.00	104.76	(544,057,146.00)
- Beban Persediaan	481,492,071.00	702,488,456.00	145.90	(220,996,385.00)
- Beban Jasa	9,066,849,091.52	7,755,736,343.00	85.54	1,311,112,748.52
- Beban Pemeliharaan	945,854,200.00	722,128,350.00	76.35	223,725,850.00
- Beban Perjalanan Dinas	2,679,799,051.00	3,182,407,475.00	118.76	(502,608,424.00)
- Beban Penyusutan	2,322,986,118.98	2,387,724,637.56	102.79	(64,738,518.58)
- Beban Amortisasi	5,000,000.00		-	5,000,000.00
-	-	-	-	-
-				

Defisit Non
Operasional
Rp.0,00

4.2.3 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dan Defisit Non Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2023	Thn 2022	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Non Operasional				
	- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0	0	0	0
	-	0	0	0	0

*Beban Luar Biasa
Rp.0,00*

4.2.4 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dan Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp.0,00. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2023	Thn 2022	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa				
	- Beban Luar Biasa	0	0	0	0
	-	0	0	0	0

*Penjelasan Pos-pos
Neraca
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,00*

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Kas dibendahara pengeluaran	-	-	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0,00*

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi Saldo Uang Tunai dan Saldo Rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

*Kas Lainnya
Rp. 0,00*

4.3.3 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,00.

Piutang
Rp.8.193.205,48

4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten sebesar Rp. 8.193.205,48 berupa Belanja Premi Asuransi sebanyak 4 (empat) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 berupa 1 Unit Kijang Innova 2.4V AT Tahun 2022 dengan Nomor Polisi A 1806, 1 Unit Honda HRV S CVT CKD Tahun 2016 dengan Nomor Polisi A 1624, 1 Unit Kijang Innova V AT Tahun 2014 dengan Nomor Polisi A 1339, 1 Unit Mitsubishi Pajero SPORT 2,5L EXCEED Tahun 2021 dengan Nomor Polisi A 1790.

Sedangkan Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dikarenakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tidak mengalokasikan Anggaran untuk belanja Premi Asuransi

Belanja Dibayar di
Muka
Rp.8.193.205,48

4.3.5 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provisni Banten sebesar Rp 8.193.205,48 berupa Belanja Premi Asuransi sebanyak 4 (empat) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 berupa 1 Unit Kijang Innova 2.4V AT Tahun 2022 dengan Nomor Polisi A 1806, 1 Unit Honda HRV S CVT CKD Tahun 2016 Nomor Polisi A 1624, 1 Unit Kijang Innova V AT Tahun 2014 dengan Nomor Polisi A 1339, 1 Unit Mitsubishi Pajero SPORT 2,5L EXCEED Tahun 2021 dengan Nomor Polisi A 1790. Sedangkan Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dikarenakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tidak mengalokasikan Anggaran Belanja Dibayar di Muka

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Asuransi Dibayar Dimuka	8,193,205.48	-
Jumlah	8,193,205.48	-

Persediaan
Rp. 53.088.738,00

4.3.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 53.088.738,00 dan Rp. 29.168.420,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Persediaan Operasional	53,088,738.00	29,168,420.00
- Persediaan ATK	34,059,786.00	24,356,530.00
- Persediaan Alat Listrik & Elektronik	1,772,892.00	-
- Perabot Kantor	2,614,050.00	396,000.00
- Kertas dan Cover	5,184,810.00	1,941,700.00
- Persediaan Bahan Komputer	9,457,200.00	2,474,190.00
Persediaan Barang Lainnya	-	-
- Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-
Jumlah	53,088,738.00	29,168,420.00

Diinformasikan selain persediaan operasional berupa persediaan bahan pakai habis sebagaimana rincian di atas, telah dilaksanakan monitoring stok opname oleh pihak Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam bukti Berita Acara Stok Opname untuk barang persediaan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten TA. 2023.

Tanah
Rp.392.250.000,00

4.3.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 392.250.000,00 dan Rp. 392.250.000,00.

Rincian Mutasi Aset tanah Tahun 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	392,250,000.00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0.00
Hibah Barang	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	392,250,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	392,250,000.00

Peralatan dan Mesin
Rp.12.180.777.510,99

4.3.8 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 12.180.777.510,99 sementara saldo pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 12.122.946.910,99. Dibandingkan dengan tahun 2022 Aset Peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 0,48% adaya Penambahan pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023. Antara lain : Belanja Modal alat Pasca Panen, Belanja Modal alat Penyimpanan Peralatan Kantor, Belanja Modal Mebel, Belanja Modal Alat Personal Komputer, dan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer, diinformasikan juga ada mutasi aset keluar pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain berupa Kendaraan Bermotor Penumpang.

Adapun mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin TA. 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	12,122,946,910.99
Mutasi tambah:	
Kapitalisasi	0.00
Belanja Modal	253,330,600.00
Mutasi Aset Keluar Antar KIB	195,500,000.00
Saldo per 31 Desember 2023	12,180,777,510.99
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	10,078,755,321.89
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2,102,022,189.10

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 masih merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2022 dikurangi dengan mutasi Aset Keluar dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, data mutasi Aset tersebut merupakan hasil rekonsiliasi oleh pihak pengurus/penyimpan Barang dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta sudah dilaksanakan proses penyusutan untuk tahun 2023.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.25.854.661.081,86*

4.3.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 25.854.661.081,86 sementara nilai Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 adalah Rp. 25.774.661.081,86. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai Gedung dan Bangunan ada kenaikan 0,31 % diinformasikan Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Penataan Lobby dan Mushola

Rincian Mutasi Nilai Aset Gedung dan Bangunan TA. 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	25,774,661,081.86
Mutasi tambah:	
Mutasi Masuk Aset	80,000,000.00
Belanja Gedung dan Bangunan 2022	80,000,000.00
-	-
Mutasi kurang:	-
Beban Pemeliharaan Gedung tempat kerja	-
Aset Lain-lain	-
Saldo per 31 Desember 2023	25,854,661,081.86
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	7,120,397,222.92
Nilai Buku per 31 Desember 2023	18,734,263,858.94

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp. 357.553.250,00

4.3.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 357.553.250,00, diinformasikan Pada Tahun 2023 tidak ada penambahan Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, begitu juga tidak terjadi Mutasi penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	357,553,250.00
Mutasi tambah:	
Mutasi Masuk Aset	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 2023	-
-	-
Mutasi kurang:	
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Lain-lain	-
Saldo per 31 Desember 2023	357,553,250.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	157,804,630.20
Nilai Buku per 31 Desember 2023	199,748,619.80

Aset Tetap Lainnya
Rp. 992.736.000,00

4.3.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 992.736.000,00. Aset tetap tersebut berupa Maket/Miniatur/Replika senilai Rp. 817.436.000,00, dan Foto Dokumen senilai Rp. 175.300.000,00. Selanjutnya tidak terdapat mutasi kurang ataupun tambah. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, dan data tersebut sudah dilaksanakan rekonsiliasi oleh pihak pengurus/penyimpan barang dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta belum dilaksanakan proses penyusutan untuk tahun 2023.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp.138.852.000,00

4.3.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 138.852.000,- Diinformasikan bahwa pembangunan Centra UKM di Kota Serang yang di anggarkan pada Tahun 2019 tidak dapat dilanjutkan seperti perencanaan sebelumnya dikarenakan Repocusing Penanganan Covid 19 namun Realisasi atas KDP Tahun 2019 adalah berupa DED Jasa Konsultasi Konsultan sebesar Rp 138.852.000,00 dan terkait kebijakan belum bisa dilakukan penghapusan atas aset dimaksud.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp.17.356.957.175,05)*

4.3.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 17.356.957.175,05) dan untuk tahun 2022 adalah sebesar (Rp. 15.229.471.056,30). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Untuk nilai Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 pihak pengurus/penyimpan barang sudah melakukan proses rekonsiliasi dan penyusutan aset untuk tahun 2023. Dengan rincian :

REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2023		
NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	10,078,755,321.89
3	Gedung dan Bangunan	7,120,397,222.92
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	157,804,630.24
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Jumlah Akumulasi		17,356,957,175.05

*Aset Tak Berwujud
Rp. 80.000.000,00*

4.3.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 80.000.000,00,- dan Rp. 0,00 Diinformasikan untuk Aset Tak Berwujud (ATB) Tahun Anggaran 2023 Berupa Belanja Software Pelaporan Pengelolaan Akuntansi bagi UMKM

*Aset Lain-Lain
(bruto)
Rp.892.992.003,00*

4.3.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain (bruto) per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 892.999.003,00 dan untuk tahun 2022 adalah Rp. 697.499.003.00. Diinformasikan Penambahan Aset Lain-lain berupa Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp. 195.500.000,00 dengan rincian :

Saldo per 31 Desember 2022	697,499,003.00
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	195,500,000.00
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN/D yang dihentikan	-
- penghapusan BMN/D	-
Saldo per 31 Desember 2023	892,999,003.00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	892,999,003.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Untuk nilai Aset Lain-lain tahun 2023 pihak pengurus/penyimpan barang sudah melakukan proses Rekonsiliasi Aset Lain-lain dengan BPKAD.

Kewajiban
Rp.32.199.985,00

4.3.16 Kewajiban

Nilai Kewajiban secara keseluruhan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 32.199.985,00 dan untuk tahun 2022 sebesar Rp.28.649.871,00. Nilai angka kewajiban tersebut adalah merupakan Utang Tagihan Belanja listrik atas Jasa Pemakaian Bulan Desember Tahun 2023. Dengan tagihan untuk Belanja Listrik Balatkop sebesar Rp 3.442.849,00 Belanja Listrik Gedung UMKM sebesar Rp 8.246.203,00 Belanja Listrik Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp 20.510.933,00.

Ekuitas
Rp.22.663.954.626,32

4.3.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 22.663.954.626,32 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 24.550.046.735,55 Nilai Ekuitas tersebut telah sesuai dengan nilai ekuitas akhir pada laporan perubahan Ekuitas Tahun 2023. Sampai dengan laporan ini disampaikan pihak pengurus barang OPD sudah melaksanakan Rekonsiliasi BMD dengan pihak terkait. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan
Ekuitas
Rp.24.550.046.735,55

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal Tahun 2023 Dinas Koperasi, dan UKM Provinsi Banten adalah sebesar Rp 24.550.046.735,55 dan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 26.470.902.224,11, Surplus Defisit-LO Tahun 2023 adalah sebesar (26.921.746.582,50) dan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp (26.714.308.457,56), R/K PPKD Tahun 2023 adalah sebesar Rp 25.035.654.473, dan Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 24.793.452.969 sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp 22.663.954.626,32 dan Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 24.550.046.735,55 dengan rincian sebagai berikut :

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BANTEN**
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	24.550.046.735,55	26.470.902.224,11
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(26.921.746.582,50)	(26.714.308.457,56)
3	R/K PPKD	25.035.654.473,00	24.793.452.969
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
430	- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
435	- SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
460	- LAIN-LAIN	-	-
425	- KOREKSI PIUTANG	-	-
45	- KOREKSI ASET (ASET TETAP DAN PERSEDIAAN)	-	-
450	- KOREKSI KEWAJIBAN	-	-
445	- KOREKSI ASET LAINNYA	-	-
455	- KOREKSI PENDAPATAN	-	-
	EKUITAS AKHIR	24.663.954.626,32	24.550.046.735,55

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

NIHIL

